



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025 – 2029**



H. HERMAN DERU
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

H. CIK UJANG
WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN

“SUMATERA SELATAN MAJU TERUS UNTUK SEMUA”

KATA PENGANTAR

Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 merupakan tindaklanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Sebagai turunannya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Rencana Strategis (Renstra) berkaitan dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsinya.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan disusun dengan berpedoman pada Pasal 343 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Surat Edaran dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 000.7.2.2/060/SE/Bappeda/2025 Tentang Pedoman Penyempurnaan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 mencakup tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang akan dicapai di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 berkaitan dengan bidang urusan kehutanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Renstra ini juga mengakomodir Program dan Indikator sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan daerah Provinsi Sumatera.

Kami menyadari dalam penyusunannya, Renstra ini tentunya belum sempurna. Untuk itu diharapkan adanya masukan yang konstruktif bagi perbaikan di masa mendatang. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra ini kami sampaikan terima kasih.

Palembang, 29 September 2025

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



H. ARIES IRWAN WAHYU, S.STPi., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c
NIP. 19681120 198903 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR vi

BAB I. PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan..... 4

1.3. Maksud dan Tujuan 6

1.4. Sistematika Penulisan 7

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN.. 9

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah..... 9

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah 9

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 15

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 20

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah 27

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan 27

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 28

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 28

2.2.2. Isu Strategis 30

BAB III. TUJUAN, ASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 34

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029 34

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029 34

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah..... 37

3.4. Pentahapan Renstra Perangkat Daerah 37

3.5. Penyajian Lokasi Fokus (Lokus) 38

3.6. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029 39

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 40

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Bidang kelautan dan Perikanan 40

4.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah..... 63

4.3. Indikator Kinerja Kunci 64

BAB V. PENUTUP..... 65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Komposisi pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan (sampai dengan 31 Mei 2025)..... 15

Tabel 2.2. Daftar inventarisasi tanah dan bangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan 16

Tabel 2.3. (T-C.23 PMDN 86/2017) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan . 20

Tabel 2.4. (T-C24 PMDN 86/2017) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan..... 25

Tabel 2.5. (Inmen 2/2025) Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah..... 31

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 35

Tabel 3.2. Penahapan Renstra Perangkat Daerah..... 38

Tabel 3.3. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD 39

Tabel 4.1. Teknik merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD 44

Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.. 53

Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 61

Tabel 4.3. Indikator Kinerja Utama PD..... 63

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Kunci 64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 3

Gambar 1.2. Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan dan
Penganggaran 4

Gambar 2.1. Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan..... 14

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan suatu acuan dan dasar kebijakan atau pengambilan keputusan untuk mengarahkan pembangunan untuk lebih fokus dan teratur. Di dalam penyusunannya diperlukan perencanaan pembangunan yang baik dan berlandaskan pada faktor-faktor ekonomi, sosial politik dan budaya suatu daerah, sehingga potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan rakyat. Penyusunan perencanaan yang baik menggunakan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah yang meliputi:

- a. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
- d. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan sektoral Kelautan dan Perikanan sebagai turunan dari RPJMD Sumatera Selatan disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

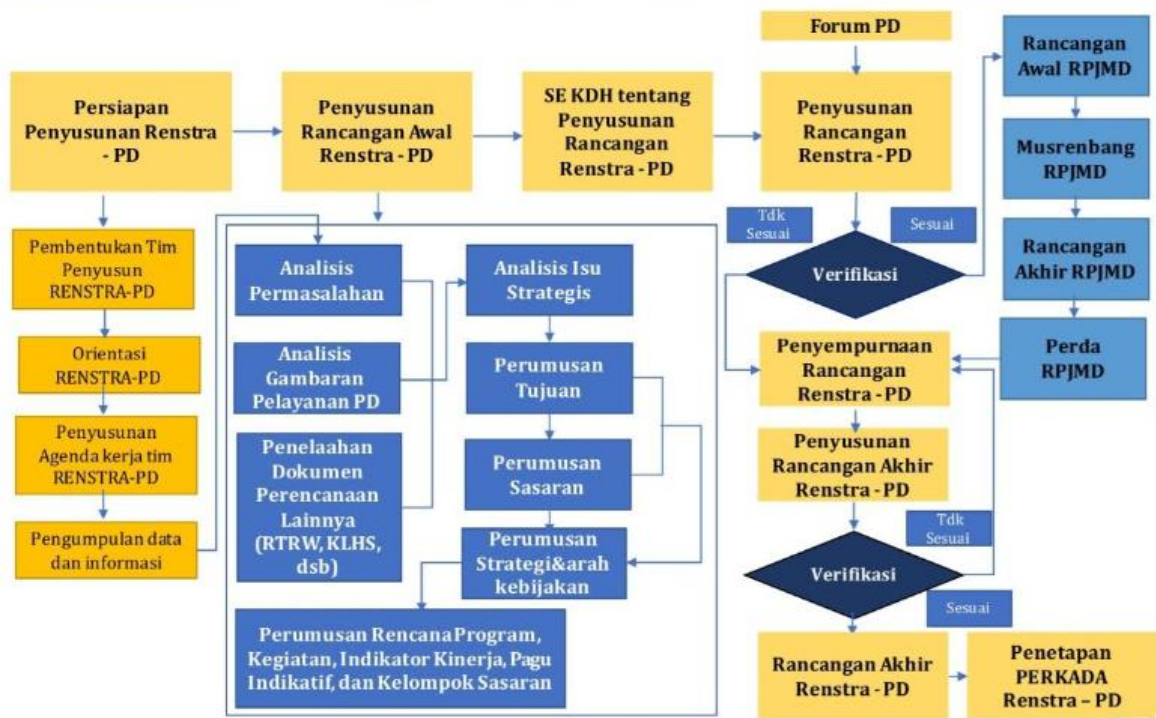
Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut : (1). Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2045; (2). Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan Tahun 2024; (3). Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan Tahun 2024 dalam pencapaian hasil (outcome); (4). Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah; (5). Kebijakan nasional (6). Regulasi yang berlaku (7). Saran dan/ atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah; serta format Renstra mengacu pada Surat Edaran dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 000.7.2.2/060/SE/Bappeda/2025 Tentang Pedoman Penyempurnaan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2025-2029.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan serta rencana pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah. Alur proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada bagan alir berikut :

**BAGAN ALIR DAN TATA CARA PENYUSUNAN
RENSTRA-PD – PERMENDAGRI 86/2017**

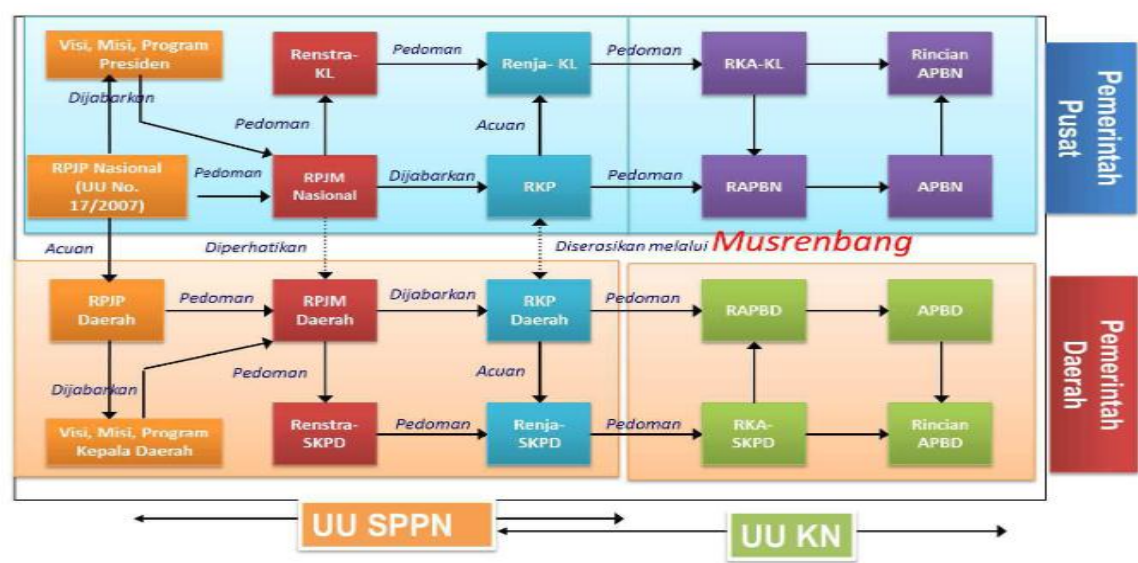


Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dijabarkan dalam visi, misi, tujuan, sasaran, dan program kepala daerah yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Keberadaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan selama periode perencanaannya, yang dalam penyusunannya juga mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keberadaan Renja Perangkat Daerah akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana RAPBD juga harus berpedoman pada RKPD Provinsi Sumatera Selatan, yang kemudian RAPBD disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Gambaran tentang hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya seperti Renstra

K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah, baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar berikut :



Gambar 1.2. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 disusun dengan merujuk pada peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konversi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang mengamanatkan Penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang di dalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
13. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penagarustmaan Gender di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan;
24. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.
25. Surat Edaran dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 000.7.2.2/060/SE/Bappeda/2025 Tentang Pedoman Penyempurnaan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan pedoman perencanaan Program/Kegiatan selama periode Tahun 2025-2029 dengan tetap mengakomodir program dan kegiatan yang mengacu pada kebijakan nasional dan kebijakan daerah. Selain itu juga untuk menghasilkan

rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan bidang urusan lingkungan hidup dan Kelautan dan Perikanan yang lebih terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 bertujuan :

- 1) Sebagai dokumen informasi mengenai program dan kegiatan kelautan dan perikanan yang akan dijadikan target pencapaian oleh aparatur serta *stakeholders* terkait; selain itu juga untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan antara provinsi dan pusat, serta antara provinsi dengan kabupaten/kota;
- 2) Terwujudnya perencanaan bidang urusan yang menjadi tugas, pokok dan fungsi Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 yang berkualitas, kolaboratif, dan akuntabel;
- 3) Terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar unit kerja dalam OPD, antar OPD, antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- 4) Terakomodirnya nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 5) Tersedianya tolak ukur untuk mengukur kinerja dan evaluasi kinerja di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.
- 6) Meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat kelautan dan perikanan termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya melalui pengelolaan sumber daya yang berkeadilan, berkelanjutan, dan inklusif.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud, Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- a. Memuat gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, seperti : Tugas, fungsi, struktur, sumber daya, kinerja Perangkat Daerah dan Kelompok sasaran layanan.
- b. Memuat hasil analisis permasalahan dan hasil analisis isu strategis dalam upaya pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

BAB III: TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi Kewenangan Daerah.

BAB IV: PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat uraian program, kegiatan, subkegiatan beserta indikator, target kinerja dan pagu indikatif. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah, Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2030 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2030 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V : PENUTUP

Memuat Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian serta evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan pasal 48 menyatakan bahwa Tugas Pokok Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan adalah untuk melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kelautan dan perikanan. Fungsi-fungsi yang diberikan untuk melaksanakan tugas pokok tersebut sebagaimana tercantum pada pasal 49 adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan.
- b. Pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur.
- c. Pembinaan teknis dan pengendalian pelaksanaannya, pengelolaan kekayaan Provinsi, serta perumusan dan penyiapan kebijaksanaan umum di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pelaksanaan dan pengawasan tugas kelautan dan perikanan untuk menjamin pemanfaatan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.
- e. Pelaksanaan sebagian tugas penatagunaan, pengembangan, pendayagunaan dan penyerasian pemanfaatan sumber daya hayati perairan, serta perizinan kelautan dan perikanan.
- f. Pelaksanaan pengembangan dan penyerasian institusi masyarakat dan dunia usaha di bidang kelautan dan perikanan.
- g. Pembinaan teknis di bidang kelautan dan perikanan.
- h. Pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugas pokoknya.
- i. Penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan.
- j. Pengawasan teknis sesuai dengan tugas pokoknya.
- k. Penelitian dalam bidang perikanan spesifik Provinsi sesuai dengan masalah keperluan dan kondisi lingkungan khusus suatu Provinsi.

- l. Pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran.
- m. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum pada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan pada Bab III Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Perikanan tangkap, membawahi :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
 2. Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan
 3. Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan
- d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi :
 1. Seksi Produksi Pengembangan Usaha dan Desiminasi Teknologi Budidaya
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya
 3. Seksi Perbenihan dan Pengendalian Lingkungan Budidaya
- e. Bidang Pengembangan Usaha, Pemasaran, Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, membawahi :
 1. Seksi Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan
 2. Seksi Mutu, Diversifikasi Produk Hasil Kelautan dan Perikanan
 3. Seksi Pengembangan Usaha Hasil Perikanan dan Kelautan
- f. Bidang Pengelolaan Ruang Laut, Perairan Umum Daratan, pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, membawahi :
 1. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 2. Seksi Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut, Perairan Umum Daratan dan Pulau-Pulau Kecil

3. Seksi Pendayagunaan dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yang terdiri dari 3 (dua) UPTD, yaitu :
1. Balai Budidaya Perikanan Air Payau dan Laut, yang berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2018 pasal 8 dan pasal 9 mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
 - Tugas Pokok adalah untuk merencanakan, melaksanakan, membina, mengevaluasi, melaporkan pelaksanaan program yang terkait dengan bidang budidaya perikanan air payau dan laut.
 - Fungsi :
 - Penyusunan program dan rencana kerja tahunan;
 - Penyediaan benih dan calon induk yang bermutu;
 - Pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan air payau dan laut;
 - Pelaksanaan pengendalian kesehatan ikan dan mencegah dan kontaminasi penyakit, bahan kimia berbahaya yang bersifat karsinogenik dan toksin;
 - Pelaksanaan uji lapang teknologi budidaya air payau dan laut;
 - Penyampaian laporan kegiatan UPTD;
 - Pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksanaan serta Fungsional;
 - Pengevaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
 2. Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP), yang berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2018 pasal 12 mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
 1. Tugas Pokok adalah untuk melakukan koordinasi, fasilitasi evaluasi dan pelaporan dalam hal pengujian dan penerapan, bimbingan diversifikasi produk perikanan, sertifikasi produk serta penerapan mutu hasil perikanan.
 2. Fungsi :
 - Pelaksanaan pengujian dan penerapan mutu, keamanan pangan pangan hasil kelautan dan perikanan serta lembaga sertifikasi produk hasil perikanan;
 - Pelaksanaan bimbingan pemenuhan persyaratan SNI;

- Pelaksanaan penerapan mutu sebagai bahan penyiapan rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);
- Pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi registrasi pelaku usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- Pelaksanaan monitoring hasil perikanan;
- Pengawasan dan pembinaan terkait kepegawaian, ketatausahaan, perencanaan anggaran, keuangan, pengolahan data dan penerbitan sertifikasi;
- Pelaksanaan koordinasi dengan bidang, instansi dan lembaga terkait lainnya di bidang pengujian dan penerapan mutu;
- Pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksana Fungsional;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

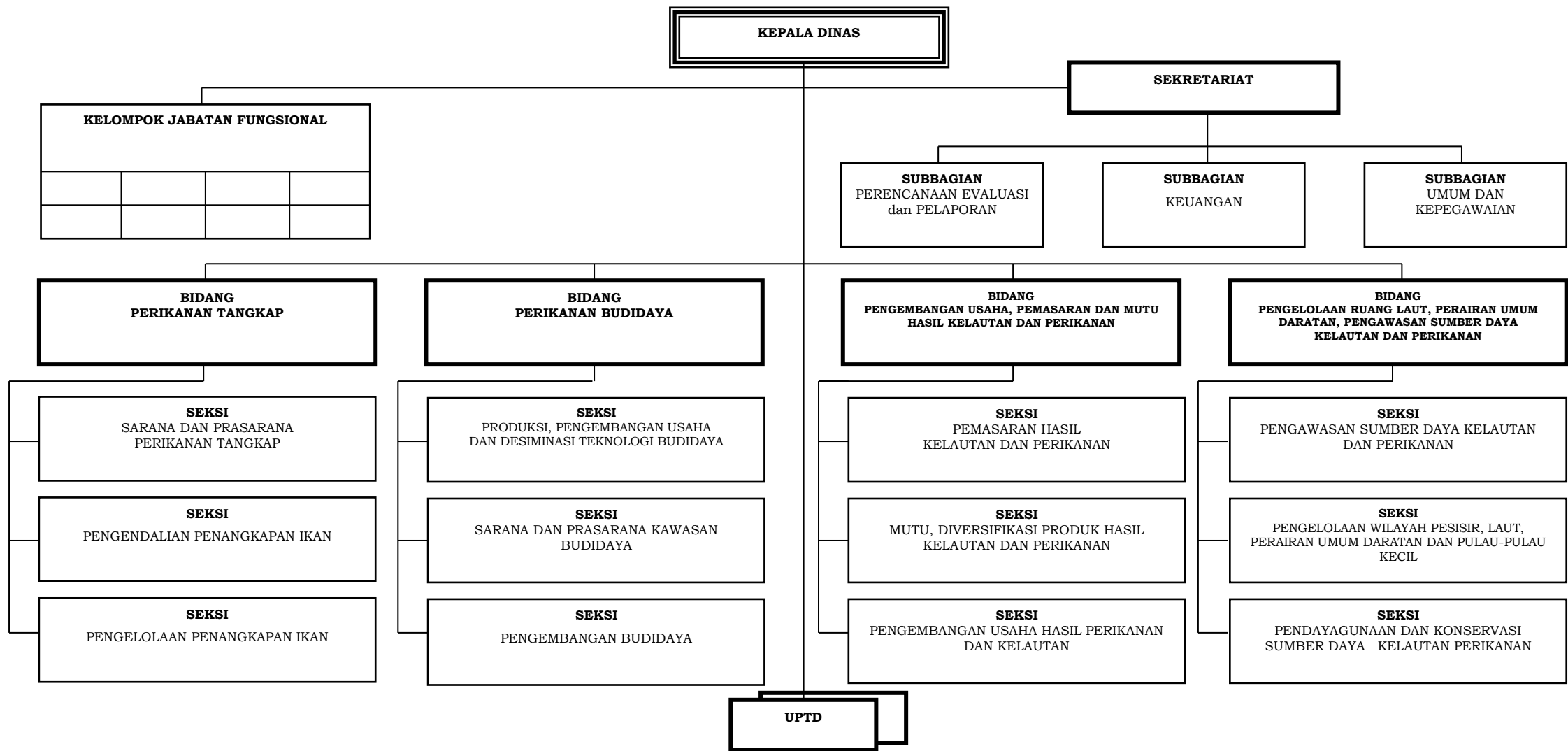
3. Pelabuhan Perikanan Sungsang

- Tugas Pokok adalah untuk melaksanakan, mengkoordinir dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi pelabuhan perikanan sungsang.
- Fungsi :
 - Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, dan evaluasi operasional pelabuhan perikanan;
 - Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
 - Pelaksanaan pemeriksaan bukti pencatatan (log book);
 - Pelaksanaan pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar;
 - Pelaksanaan penerbitan sertifikasi hasil tangkapan ikan;
 - Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
 - Pelaksanaan pemeliharaan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana;
 - Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantina ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
 - Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitasi usaha;

- Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;
 - Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik (CPIB);
 - Pelaksanaan inspeksi pembokaran ikan;
 - Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan;
 - Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan;
 - Pembagian tugas kepada kepala Subbagian dan Pelaksana serta Fungsional;
 - Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, yang dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Bab VI pasal 23 mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Gambar di bawah ini :

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan



2.1.2.Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas, professional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumberdaya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing masing. Sebagai salah satu perangkat kerja Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang pada tahun 2025 berdasarkan masing-masing komposisi pegawai tergambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1. Komposisi Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan (sampai dengan 31 Mei 2025)

NO.	JENIS	JUMLAH (Org)
1	SDM Berdasarkan Jenis Kelamin	
	LAKI-LAKI	78
	PEREMPUAN	57
	TOTAL	135
2	SDM Berdasarkan Golongan	
	Golongan IV	19
	Golongan III	66
	Golongan II	4
	Golongan I	1
	Golongan IX PPPK	13
	Golongan VII PPPK	5
	Non-ASN	27
	TOTAL	135
3	SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan	
	Doktoral / S3	-
	Magister/S2	25
	Sarjana/S1	69
	Diploma 4/D4	8
	Diploma 3/D3	16
	Diploma 2/D2	-
	Diploma/D1	-
	SMA	16
	SMP	-
	SD	1
	TOTAL	135

Sumber data : Subbag Umum dan Kepegawaian 2025

SDM berstatus PNS dan Non PNS berjumlah 135 orang. Proporsi gender di Dinas Kelautan dan Perikanan, laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan dengan jumlah pegawai laki-laki 78 orang dan pegawai perempuan 57 orang. Kurang lebih setengah ASN dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan berpendidikan S1 (69 orang, 51,1%), diikuti dengan S2 (25 orang, 18,5 %), D3 (16 orang, 11,9%), SMA (16 orang, 11,9%), D4 (8 orang, 5,9%), dan SD (1 orang, 0,7 %). Dari aspek kualifikasi pendidikan masih terdapat pegawai yang belum memenuhi kualifikasi, namun karena faktor pengalaman kerja mereka memiliki kompetensi dalam jabatan yang diduduki sehingga tetap dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.

b. Aset-aset yang dikelola

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang terdiri dari gedung Dinas maupun Gedung UPTD dan sebagainya.

Tabel 2.2. Daftar Inventarisasi Tanah dan Bangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan

No.	Jenis Aset			Kondisi bangunan	Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Status Tanah	Status Tanah	Ket
1	2			3	4	5	7	8	9
1	Bangunan Permanen	Gedung	Kantor	Baik		Jl. Taman Sari II No. 73 Km 6 Palembang.		Pembelian	Terdaftar
2	Bangunan Permanen	Gedung	Kantor	Baik	48.75	Desa Sungai Lumpur Kec. Tulung Selapan Kab. OKI (Pulau Maspari)		Pembelian	Terdaftar
3	Bangunan Permanen	Gedung	Kantor	Baik		Jl. Taman Sari II No. 73 Km 6 Palembang.		Pembelian	Terdaftar
4	Bangunan Permanen	Gedung	Kantor	Baik		Jl. Pangeran Ratu Jakabaring Palembang	Tanah Milik Pemda	Pembelian	Terdaftar
5	Bangunan Permanen	Gedung	Kantor	Baik		Desa Air Satan Kec. Muara Beliti Kab. Musi Rawas		Pembelian	Terdaftar
6	Bangunan Permanen	Gedung	Kantor	Baik	80	BBI Air Satan (Perluas KTR) Kec. Muara Beliti Kel. Air Satan		Hibah	Terdaftar
7	Bangunan Permanen	Gedung	Kantor	Baik	216	Jl. Pangeran Ratu Jakabaring Palembang	Tanah Milik Pemda	Pembelian	Terdaftar
8	Bangunan Permanen	Gedung	Kantor	Rusak Berat		Jl. Pangeran Ratu Jakabaring Palembang		Pembelian	Terdaftar
9	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain			Baik	356	PIH Jakabaring		Hibah	Terdaftar
10	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain			Baik		Desa Air Satan Kec. Muara Beliti Kab. Musi Rawas		Pembelian	Terdaftar
11	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain			Baik	52	Desa Sungai Lumpur Kec. Tulung Selapan Kab. OKI (Pulau Maspari)		Pembelian	Terdaftar
12	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain			Baik	40	PIH Jakabaring		Hibah	Terdaftar

No.	Jenis Aset	Kondisi bangunan	Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Status Tanah	Status Tanah	Ket
1	2	3	4	5	7	8	9
13	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik		Jl. Pangeran Ratu Jakabaring Palembang		Hibah	Terdaftar
14	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	828	Desa Sungai Lumpur Kec. Tulung Selapan Kab. OKI (Pulau Maspari)		Pembelian	Terdaftar
15	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik		Jl. Pangeran Ratu Jakabaring Palembang		Hibah	Terdaftar
16	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik		Jl. Pangeran Ratu Jakabaring Palembang		Hibah	Terdaftar
17	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik		Jl. Pangeran Ratu Jakabaring Palembang		Hibah	Terdaftar
18	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	Baik	22	BBI Tri Rahayu (Gudang) Kel. O Mangun Harjo Jl. Perikanan Kec. Purwodadi		Hibah	Terdaftar
19	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	Baik	37.5	Desa Sungai Lumpur Kec. Tulung Selapan Kab. OKI (Pulau Maspari)		Pembelian	Terdaftar
20	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	Baik	40	Desa Sungai Lumpur Kec. Tulung Selapan Kab. OKI (Pulau Maspari)		Pembelian	Terdaftar
21	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	Baik		UPTD PPI Sungsang (Desa Marga Sungsang, Kab. Banyuasin)		Pembelian	Terdaftar
22	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	Baik		Desa Air Satan Kec. Muara Beliti Kab. Musi Rawas		Pembelian	Terdaftar
23	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	Baik	10	BBI Tri Rahayu (Gudang Genset) Kel. O Mangun Harjo Jl. Perikanan Kec. Purwodadi		Hibah	Terdaftar
24	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	Baik	202.85	Jl. Pangeran Ratu Jakabaring Palembang		Pembelian	Terdaftar
25	Bangunan Gedung Laboratorium Lain-lain (dst)	Baik	54	Desa Sungai Lumpur Kec. Tulung Selapan Kab. OKI (Pulau Maspari)		Pembelian	Terdaftar
26	Bangunan Gedung Laboratorium Lain-lain (dst)	Baik		Jl. Taman Sari II No. 73 Km 6 Palembang.		Pembelian	Terdaftar
27	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Baik		Jl. Pangeran Ratu Jakabaring Palembang		Pembelian	Terdaftar
28	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	30	Desa Air Satan Kec. Muara Beliti Kab. Musi Rawas		Hibah	Terdaftar
29	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	72	BBI Tri Rahayu (Aula) Kec. Muara Beliti Jl. Syueb Tamat		Hibah	Terdaftar
30	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	112	UPT Sungsang		Pembelian	Terdaftar
31	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik		Jl. Taman Sari II No. 73 Km 6 Palembang.		Pembelian	Terdaftar
32	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik	80	Desa Air Satan Kec. Muara Beliti Kab. Musi Rawas		Hibah	Terdaftar
33	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik	15	PIH Jakabaring		Hibah	Terdaftar

No.	Jenis Aset	Kondisi bangunan	Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Status Tanah	Status Tanah	Ket
1	2	3	4	5	7	8	9
34	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik	42	BBI Air Satan (Rumah Jaga) Kec. Muara Beliti Jl. Syueb Tamat		Hibah	Terdaftar
35	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik	42	BBI Tri Rahayu (Rumah Jaga) Kel. O Mangun Harjo Jl. Perikanan		Hibah	Terdaftar
36	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik	153	Desa Air Satan Kec. Muara Beliti Kab. Musi Rawas		Hibah	Terdaftar
37	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik		Desa Air Satan Kec. Muara Beliti Kab. Musi Rawas		Pembelian	Terdaftar
38	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	Baik		UPT Pelabuhan Perikanan Sungsang		Pembelian	Terdaftar
39	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain (dst)	Rusak Berat		Desa Sungai Lumpur Kec. Tulung Selapan Kab. OKI (Pulau Maspari)		Hibah	Terdaftar
40	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain (dst)	Baik		Desa Sejarah Sakti (Lebung Karangan) Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir		Pembelian	Terdaftar
41	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain (dst)	Baik		Desa Sungsang Kab. Banyuasin II		Pembelian	Terdaftar
42	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain (dst)	Baik	52.5	Desa Sungai Lumpur Kec. Tulung Selapan Kab. OKI (Pulau Maspari)		Pembelian	Terdaftar
43	Gedung Garasi/Pool Permanen	Baik		Desa Air Satan Kec. Muara Beliti Kab. Musi Rawas		Pembelian	Terdaftar
44	Gedung Garasi/Pool Permanen	Baik	37.6	PIH Jakabaring		Hibah	Terdaftar
45	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain (dst)	Baik		Jl. Pangeran Ratu Jakabaring Palembang		Pembelian	Terdaftar
46	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain (dst)	Baik	10.37	Desa Marga Sungsang, Kab. Banyuasin		Pembelian	Terdaftar
47	Bangunan TPI Permanen	Baik		Jl. Pangeran Ratu Jakabaring Palembang		Hibah	Terdaftar
48	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	50	Desa Air Satan Kec. Muara Beliti Kab. Musi Rawas		Hibah	Terdaftar
49	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik		UPPU Pulokerto		Pembelian	Terdaftar
50	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik		BBI Tri Rahayu (Pagar)		Hibah	Terdaftar
51	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik		Desa Air Satan Kec. Muara Beliti Kab. Musi Rawas		Pembelian	Terdaftar
52	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik		Desa Sungai Lumpur Kec. Tulung Selapan Kab. OKI (Pulau Maspari)		Pembelian	Terdaftar
53	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik		Desa Sungai Lumpur Kec. Tulung Selapan Kab. OKI (Pulau Maspari)		Pembelian	Terdaftar
54	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik		Desa Air Satan Kec. Muara Beliti Kab. Musi Rawas		Pembelian	Terdaftar
55	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	90	Desa Sungai Lumpur Kec. Tulung Selapan Kab. OKI (Pulau Maspari)		Pembelian	Terdaftar

No.	Jenis Aset	Kondisi bangunan	Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Status Tanah	Status Tanah	Ket
1	2	3	4	5	7	8	9
56	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	297	Desa Sungai Lumpur Kec. Tulung Selapan Kab. OKI (Pulau Maspari)		Pembelian	Terdaftar
57	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik		Desa Suka Pulih Kab. OKI		Pembelian	Terdaftar
58	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik		Desa Sungsang IV Kab. Banyuasi II	Tanah Hak Pengelolaan	Pembelian	Terdaftar
59	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik		Jl. Pangeran Ratu Jakabaring Palembang		Pembelian	Terdaftar
60	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen	Baik		Jl. Taman Sari II No. 73 KM.6 Palembang		Pembelian	Terdaftar
61	Taman Permanen	Baik		Jl. Pangeran Ratu Jakabaring Palembang		Pembelian	Terdaftar
62	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	Baik	51.25	Desa Sungai Lumpur Kec. Tulung Selapan Kab. OKI (Pulau Maspari)		Pembelian	Terdaftar
63	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Baik	240	Jl. Veteran Gang Merak Kel 8 Ilir	Tanah Milik Pemda	Pembelian	Terdaftar
64	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	Baik	48	UPT Sungsang		Pembelian	Terdaftar
65	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Darurat Lain-lain (dst)	Baik	80	Desa Sungai Lumpur Kec. Tulung Selapan Kab. OKI (Pulau Maspari)		Pembelian	Terdaftar
66	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Darurat Lain-lain (dst)	Baik	72	Desa Sungai Lumpur Kec. Tulung Selapan Kab. OKI (Pulau Maspari)		Pembelian	Terdaftar
67	Bangunan Menara Radio	Baik	22	Pulau Maspari		Hibah	Terdaftar
68	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	Baik		Desa Air Satan Kec. Muara Beliti Kab. Musi Rawas		Hibah	Terdaftar
69	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	Baik		Desa Air Satan Kec. Muara Beliti Kab. Musi Rawas		Hibah	Terdaftar
70	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	Baik		Desa Air Satan Kec. Muara Beliti Kab. Musi Rawas		Hibah	Terdaftar
71	Tugu/Tanda Batas Lain-lain (dst)	Baik	422	PIH Jakabaring		Hibah	Terdaftar
72	Pilar/tugu/tanda lainnya	Baik	16.5	Jl. Pangeran Ratu Jakabaring Palembang		Pembelian	Terdaftar
73	Pilar/tugu/tanda lainnya	Baik	14.44	Jl. Pangeran Ratu Jakabaring Palembang		Pembelian	Terdaftar
74	Pagar Permanen	Baik		Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumsel		Pembelian	Terdaftar
75	Pagar Permanen	Baik		Jl. Taman Sari II No. 73 Km 6 Palembang.		Pembelian	Terdaftar
76	Pagar Permanen	Baik	44770	Jl. Serma Srip Kel. Pasar Baru Kab. Lahat		Pembelian	Terdaftar

Sumber data : Subbag Umum dan Kepegawaian 2025

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel di bawah ini menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target RPJMD dengan Realisasi Tahun 2020-2024.

Tabel 2.3. (T-C.23 PMDN 86/2017) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai Tukar Nelayan/NTN	>100	-	-	102,5	102,8	104,5	104,5	104,5	100,4	104,52	110,9	119,4	117,43	97,95	101,67	106,12	114,26	112,37
2	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	-	Meningkat $\geq$ 5%/Tahun	-	204.000	212.000	220.000	228.000	228.000	125.348	117.742	151.241	162.105	159.475	61,45	55,53	68,75	71,10	69,95
3	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan / NTPi	$\geq$ 100	-	-	100,46	100,96	94,35	94,5	94,75	93,58	94,32	96,33	97,29	94,84	93,15	93,42	102,10	102,95	100,09
4	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	-	Meningkat $\geq$ 7%/Tahun	-	480.000	500.000	525.000	545.000	579.000	357.138	274.049	249.378	326.719	292.217	74,40	54,81	47,50	59,95	50,47
5	Angka Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	>65	-	-	42,5	43	43,5	44	44,5	42,71	42,84	43,02	44	46,16	100,49	99,63	98,90	100,00	103,73
6	Produk olahan kelautan dan perikanan (ton)	-	Meningkat $\geq$ 10%/Tahun	-	334.168,12	384.293	441.937	508.228	350.000	275.294	253.756	236.186	216.290	201.510	82,38	66,03	53,44	42,56	57,57

Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada pencapaian sasaran/target Rencana Strategis pada periode sebelumnya. Capaian sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode 2020 - 2024 dapat dilihat pada realisasi capaian kinerja masing-masing indikator kinerja setiap tahun perencanaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra sebelumnya yang ditetapkan 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 3 Indikator Kinerja Kunci (IKK). Capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan pada indikator kinerja rata-rata telah memenuhi target yang ditetapkan meskipun masih ada beberapa target yang belum tercapai dikarenakan beberapa faktor-faktor lainnya sehingga beberapa program/kegiatan harus dilakukan efisiensi dan *refocusing* anggaran/kegiatan.

1. Nilai Tukar Nelayan

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata per Tahun
Target	102,5	102,8	104,5	104,5	104,5	103,76
Realisasi	100,4	104,52	110,9	119,4	117,43	110,53
%	97,95	101,67	106,12	114,26	112,37	106,48

Berdasarkan tabel target dan capaian NTN diatas tahun 2020-2024 secara umum perbandingan antara target dan capaian dalam 5 tahun yakni sebesar 106,48%. Sehingga angka capaian pada tahun terakhir (tahun 2024) bisa dijadikan target pada Renstra Tahun 2025 – 2029.

Angka capaian diatas menunjukkan Sumatera Selatan telah berada pada angka yang ideal dalam kesejahteraan karena standar kesejahteraan nelayan adalah NTN sebesar 100, jika NTN >100, harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Artinya pendapatan nelayan naik lebih besar dari pengeluarannya dengan kata lain surplus.

2. Produksi Perikanan Tangkap (ton)

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata per Tahun
Target	204.000	212.000	220.000	228.000	228.000	218.400
Realisasi	125.348	117.742	151.241	162.105	159.475	143.182
%	61,45	55,75	68,75	71,10	69,95	65,56

Berdasarkan tabel target dan capaian Produksi Perikanan Tangkap tahun 2020-2024 secara umum perbandingan antara target dan capaian dalam 5 tahun yakni sebesar 65,56 %. Angka ini masih sangat jauh dari target yang diharapkan hal tersebut karena pada tahun 2019 – 2022 para pelaku usaha perikanan termasuk dibidang perikanan tangkap terdampak resesi ekonomi karena

pandemi Covid-19. Pada tahun tersebut banyak rumah tangga nelayan yang berpindah profesi atau armada yang dijalankan tidak sebanyak sebelum pandemi Covid-19, sehingga produktifitasnya menurun. Pembatasan kegiatan sosial (*social distancing*) juga mengakibatkan masyarakat tidak dapat memutar modal sehingga mengakibatkan produksi menurun. Hingga tahun 2024 dampak dari pandemi Covid-19 belum sepenuhnya pulih yang menyebabkan produksi perikanan tangkap belum mencapai target yang diharapkan. Angka target pada tahun sebelumnya tidak relevan lagi untuk dijadikan target pada Renstra 2025 – 2029, sehingga target renstra 2025 – 2029 didasarkan pada angka rata-rata capaian 5 (lima) tahun sebelumnya.

3. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata per Tahun
Target	100,46	100,96	94,35	94,5	94,75	97,00
Realisasi	93,58	94,32	96,33	97,29	94,84	95,27
%	93,15	93,42	102,10	102,95	100,09	98,34

Berdasarkan tabel target dan capaian NTPi diatas tahun 2020-2024 secara umum perbandingan antara target dan capaian dalam 5 tahun yakni sebesar 98,34%. Sehingga rata-rata capain 5 tahun terakhir yang dijadikan sebagai acuan untuk menentukan target Renstra 2025 – 2029.

Angka capaian diatas menunjukkan Sumatera Selatan belum berada pada angka yang ideal dalam kesejahteraan karena standar kesejahteraan pembudidaya ikan adalah NTPi sebesar 100. Karena daya beli masyarakat pembudidaya sangat dipengaruhi harga komoditas lain seperti harga pakan pabrikan, harga obat-obatan ikan serta naik turunnya harga jual ikan dipasaran.

4. Produksi Perikanan Budidaya (ton)

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata per Tahun
Target	480.000	500.000	525.000	545.000	579.000	525.800
Realisasi	357.138	274.049	249.378	326.719	292.217	299.900
%	74,40	54,81	47,50	59,95	50,47	57,43

Berdasarkan tabel target dan capaian Produksi Perikanan Budidaya tahun 2020-2024 secara umum perbandingan antara target dan capaian dalam 5 tahun yakni sebesar 57,43%. Angka ini masih sangat jauh dari target yang diharapkan hal tersebut karena pada tahun 2019 – 2022 para pelaku usaha perikanan termasuk dibidang perikanan budidaya terdampak resesi ekonomi karena pandemi Covid-19. Pada tahun tersebut banyak rumah tangga pembudidaya

yang tidak lagi mampu membiayai operasional budidaya perikanan, sehingga produktifitasnya menurun. Pembatasan kegiatan sosial (*social distancing*) juga mengakibatkan masyarakat tidak dapat memutar modal sehingga mengakibatkan produksi menurun. Hingga tahun 2024 dampak dari pandemi Covid-19 belum sepenuhnya pulih yang menyebabkan produksi perikanan budidaya belum mencapai target yang diharapkan. Angka terget pada tahun sebelumnya tidak relevan lagi untuk dijadikan target pada Renstra 2025 – 2029, sehingga target renstra 2025 – 2029 didasarkan pada angka rata-rata capaian 5 (lima) tahun sebelumnya.

5. Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata per Tahun
Target	42,5	43	43,5	44	44,5	43,50
Realisasi	42,71	42,84	43,02	44	46,16	43,75
%	100,49	99,63	98,90	100,00	103,73	100,55

Angka konsumsi ikan (AKI) masyarakat Sumatera Selatan pada tahun 2020-2024 rata-rata sudah mencapai target yang sudah ditetapkan yaitu rasio capaian 100,55 % dari angka yang ditargetkan.

AKI sebelum tahun 2025 dirumuskan dengan penrhitungan 3 komponen yakni :

- a) Konsumsi ikan didalam rumah tangga (komponen a)
- b) Konsumsi ikan di luar rumah tangga (komponen b)
- c) Konsumsi ikan tidak tercatat yang sudah disetarakan utuhsegar (komponen c)

Sedangkan mulai tahun 2025 perhitungan angka konsumsi ikan sudah mempedomani Amanat Peraturan Presiden No. 72 tahun 2021 terkait program percepatan penurunan prevalensi stunting melalui pendekatan rumah tangga dan Surat Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, BPS Nomor B30/06000/VS.190/2024 tanggal 8 Maret 2024 perihal Tanggapan Penyediaan Kebutuhan yang menginformasikan bahwa data ikan pada penghitungan konsumsi ikan di luar rumah tangga yaitu hotel, restoran, dan katering (Horeka) yang sebelumnya dikeluarkan oleh BPS tidak lagi dilakukan/tersedia. Sehingga metodologi penghitungan AKI mengalami reformulasi dengan tidak menghitung Konsumsi Ikan di luar rumah tangga (komponen b) dan Konsumsi Ikan tidak tercatat yang sudah disetarakan utuh segar (komponen c).

Akibatnya dari tidak dihitungnya dua komponen tersebut Angka Konsumsi Ikan menjadi lebih kecil daripada 5 tahun sebelumnya. Pada Rapat Reformulasi Penghitungan AKI pada tanggal 6 – 7 Mei 2025 di Hotel Batiqa Palembang telah

dilakukan perhitungan target Angka Konsumsi Ikan untuk tahun 2025 – 2029 (angka tersebut akan ditampilkan pada tabel 4.8)

6. Produk Olahan Kelautan dan Perikanan (ton)

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata per Tahun
Target	334.168	384.293	441.937	508.228	350.000	403.725
Realisasi	275.294	253.756	236.186	216.290	201.510	236.607
%	82,38	66,03	53,44	42,56	57,57	60,40

Berdasarkan tabel target dan capaian Produksi Olahan Perikanan tahun 2020-2024 secara umum perbandingan antara target dan capaian dalam 5 tahun yakni sebesar 60,40%.

Realisasi produk olahan tidak mencapai target dikarenakan terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan sektor hulu (produksi perikanan tangkap dan budidaya) produktifitasnya tidak optimal. Sehingga target 5 tahun terakhir tidak lagi relevan untuk dijadikan pada 5 tahun yang akan datang. Target produksi olahan ini akan mengacu pada rata-rata produksi 5 tahun sebelumnya.

Tabel di bawah ini menunjukkan tingkat Realisasi Anggaran dan rata-rata pertumbuhan anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

Tabel 2.2. (T-C.24 PMDN 86/2017) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Anggaran (Juta)					Realisasi Anggaran (Juta)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40,00	40,00	40,00			35,00	55,00	25,00			87,50	137,50	62,50	0	18,32
Retribusi Daerah			40,00	40,00	40,00			35,00	55,00	25,00			87,50	137,50	62,50	0	18,32
Belanja Operasi	21.092,24	21.092,24	24.557,97	28.339,31	34.835,62	19.748,57	19.748,57	23.030,24	26.590,26	32.855,06	93,63	93,63	93,78	93,83	94,31	13,36	13,57
Belanja Pegawai	12.050,24	12.050,24	14.929,30	14.622,60	15.546,29	11.455,80	11.455,80	14.046,14	13.392,95	14.439,22	95,07	95,07	94,08	91,59	92,88	6,58	5,94
Belanja Barang dan Jasa	9.042,01	9.042,01	9.628,67	13.716,71	19.289,33	8.292,78	8.292,78	8.984,10	13.197,31	18.415,84	91,71	91,71	93,31	96,21	95,47	20,85	-1,69
Belanja Modal	12.363,95	12.363,95	8.997,26	9.916,55	5.504,27	12.202,27	12.202,27	530,06	9.159,53	5.485,03	98,69	98,69	5,89	92,37	99,65	-18,32	-9,32
Belanja Hibah	1.535,55	1.535,55				1.484,80	1.484,80				96,69	96,69				0	0
Jumlah Total Belanja	34.991,74	34.991,74	33.555,23	38.255,86	40.339,89	33.435,64	33.435,64	23.560,30	35.749,79	38.340,09	95,55	95,55	70,21	93,45	95,04	3,62	-1,13

Berdasarkan data perkembangan anggaran dan realisasi tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, dapat diketahui bahwa komponen belanja operasi masih menjadi porsi terbesar dalam struktur belanja daerah. Pada sisi pendapatan, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari retribusi daerah relatif kecil dan tidak mengalami perubahan signifikan pada sisi anggaran, yaitu tetap sebesar Rp. 40.000.000 setiap tahun. Namun demikian, realisasi menunjukkan fluktuasi antara Rp. 25.000.000 sampai dengan Rp. 55.000.000, dengan rasio capaian terhadap anggaran yang belum konsisten. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya intensif dalam rangka optimalisasi penerimaan PAD.

Pada komponen belanja operasi, baik belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa mengalami tren peningkatan. Realisasi belanja pegawai meningkat dari Rp. 11.455.795.025 pada tahun 2020 menjadi Rp. 14.439.216.455 pada tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,94 persen. Demikian pula belanja barang dan jasa yang menunjukkan pertumbuhan cukup signifikan, terutama pada tahun 2023 dan 2024, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 20,85 persen. Hal tersebut menggambarkan adanya peningkatan kebutuhan pendanaan guna mendukung pelayanan pemerintahan serta pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat operasional.

Sementara itu, belanja modal memperlihatkan tren penurunan dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -9,32 persen, khususnya pada tahun 2022 di mana realisasi belanja hanya sebesar Rp. 530.061.500. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya keterbatasan dalam alokasi belanja untuk pembangunan infrastruktur maupun peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik. Secara agregat, total belanja daerah menunjukkan rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 3,62 persen, namun realisasi justru mengalami penurunan rata-rata sebesar -1,13 persen. Dengan demikian, efektivitas dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program perlu terus ditingkatkan agar capaian pembangunan daerah dapat lebih optimal.

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai kelompok sasaran layanan sebagai berikut :

1. Masyarakat Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan
2. Kelompok Nelayan (KUB), Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (Poklahsar) dan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas);
3. Unit Pengolah Ikan (UPI) Menengah Besar;
4. Pemegang Perizinan Berusaha Bidang Perikanan;
5. OPD terkait Kabupaten/Kota;
6. Stakeholder Lainnya yang fokus pada pembangunan Kelautan dan Perikanan

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

A. Instansi Pemerintah

- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Mendukung program nasional seperti bantuan alat tangkap, pelatihan, dan konservasi kawasan.
- Dinas Perikanan Kabupaten/Kota Koordinasi pelaksanaan teknis di lapangan, termasuk data statistik dan pengawasan.
- Balai Besar/Balai Riset Perikanan Memberikan dukungan teknis seperti pembenihan, riset, dan pelatihan SDM.

B. Lembaga Pendidikan dan Riset

- Universitas dan Politeknik Kelautan dan Perikanan Kolaborasi dalam riset, kajian kebijakan, dan pengembangan teknologi tepat guna.
- LIPI/BRIN/BRIDA Kajian ilmiah untuk pengelolaan dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan.

C. Lembaga Keuangan dan Perbankan

- Bank BRI, Bank BNI, Bank Syariah Indonesia Menyediakan akses pembiayaan untuk nelayan dan pembudidaya melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat).
- BLU KKP LPMUKP Mendukung Pelaku Usaha Perikanan dan Koperasi perikanan dalam penguatan modal usaha.

D. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan NGO

- LSM/NGO yang Mendukung program konservasi, penguatan kelembagaan masyarakat pesisir, dan edukasi lingkungan.

E. Pelaku Usaha dan Industri

- Pelaku Usaha atau Perusahaan pengolahan hasil perikanan Menjadi mitra dalam hilirisasi produk dan peningkatan nilai tambah.
- Startup teknologi perikanan seperti eFishery atau Aruna yang mendukung digitalisasi rantai pasok dan akses pasar.

F. Masyarakat dan Kelembagaan Lokal

- Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) Perikanan dan Pokmaswas Mitra utama dalam pelaksanaan program pemberdayaan dan pengawasan sumber daya.
- Koperasi Perikanan Mendukung distribusi sarana produksi dan pemasaran hasil.

2.2. Permasalahan Dan Isu Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya seperti tercantum dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan mencatat ada beberapa permasalahan penting yang perlu mendapat perhatian antara lain :

A. Sumberdaya Manusia

Masalah : Belum meratanya kesempatan bagi pegawai dalam mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi.

Akar Masalah :

- Ketersediaan Anggaran Pelatihan/Peningkatan Kompetensi yang terbatas.
- Pelatihan belum menjangkau secara merata dan belum optimal.

B. Produktivitas Perikanan

Masalah : Produksi sektor perikanan belum optimal.

Akar Masalah :

- Sarana prasarana penangkapan dan budidaya ikan yang masih terbatas.
- Modal usaha sulit dijangkau oleh pelaku perikanan.
- Akses terhadap teknologi dan informasi masih terbatas.
- Pendampingan usaha belum berkelanjutan.

C. Kerusakan SDA dan Ekosistem Perairan

Masalah: Perairan rusak dan tercemar oleh limbah (minyak, oli bekas, sampah anorganik).

Akar Masalah:

- Masih berlangsungnya kegiatan illegal fishing yang menggunakan alat/bahan penangkap ikan yang dilarang (tuba, potassium, setrum Listrik, pukot, dsb).
- Sistem pengawasan dan penegakan hukum belum efektif.
- Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan masih rendah.
- Adanya perubahan musim dan cuaca global yang ekstrem sehingga mengancam kelestarian ekosistem dan populasi ikan.

D. Usaha Ekonomi Perikanan

Masalah: Pengembangan usaha ekonomi perikanan belum maksimal.

Akar Masalah:

- Akses terhadap permodalan masih terbatas.
- Akses pasar belum optimal.
- Teknologi dan informasi belum menjangkau pelaku usaha secara luas.
- Pendampingan usaha belum berkelanjutan.

E. Angka Konsumsi Ikan Menurun

Masalah: Kurangnya pasokan ikan (terutama ikan laut)

Akar Masalah:

- Distribusi ikan belum merata, terutama ke daerah terpencil.
- Sistem rantai dingin (cold chain) belum memadai.
- Sistem logistik belum mendukung distribusi yang efisien.
- Menurunnya Daya beli Masyarakat.

2.2.2. ISU STRATEGIS

Pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Sumatera Selatan banyak menghadapi kendala, masalah dan isu-isu yang berkembang. Isu-isu tersebut perlu mendapatkan perhatian dan solusi penyelesaiannya. Identifikasi isu strategis perangkat daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan isu lingkungan dinamis di tingkat global, nasional dan regional yang dapat mempengaruhi perangkat daerah baik langsung ataupun tidak langsung.

Pembangunan kelautan dan perikanan menghadapi tantangan strategis yang semakin kompleks dalam lima tahun ke depan. Tekanan terhadap sumber daya perairan, baik dari aktivitas eksploitasi maupun perubahan iklim, menuntut adanya kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan. Isu degradasi ekosistem pesisir, penurunan kualitas lingkungan perairan, serta kebutuhan peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan menjadi fokus utama yang harus ditangani secara terpadu. Di sisi lain, potensi perikanan budidaya dan tangkap yang besar membuka peluang untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam periode 2025–2029, arah pembangunan kelautan dan perikanan Sumatera Selatan dituntut untuk menyeimbangkan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestarian lingkungan. Isu strategis yang muncul mencakup penguatan tata kelola perikanan berkelanjutan, peningkatan daya saing produk perikanan, serta adaptasi terhadap dinamika global seperti digitalisasi rantai pasok dan tuntutan sertifikasi mutu. Selain itu, pemberdayaan masyarakat pesisir melalui peningkatan kapasitas, akses permodalan, dan perlindungan sosial menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan sosial di wilayah perairan. Dengan demikian, pembangunan sektor ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada keberlanjutan dan keadilan bagi seluruh pelaku usaha kelautan dan perikanan. Isu strategis dirumuskan dari berbagai dokumen dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kertas kerja dalam Tabel Isu Strategis Perangkat Daerah berikut ini :

Tabel 2.3 (Inmen 2/2025)
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perikanan Budidaya a. Kawasan Budidaya Air Tawar Potensi: 47.882 Ha Pemanfaatan: 30.062 Ha Tingkat pemanfaatan: 62,78 % Peluang: 37,22 % 5. Kawasan Budidaya Laut Potensi: 29.271 Ha Pemanfaatan: 14,63 Ha Tingkat pemanfaatan: 0,05 % Peluang: 99,95 % 5. Kawasan Budidaya Payau Potensi: 87.184 Ha Pemanfaatan: 43.384 Ha Tingkat pemanfaatan: 49,76 % Peluang: 50,24 % 2. Perikanan Tangkap a. Perairan Laut Luas: 8.105,97 km ² Potensi: 44.311,65 ton	1. Sumberdaya Manusia: Masih kurangnya pelatihan dan pembinaan terhadap SDM. 2. Produktivitas Perikanan: belum optimalnya Produksi perikanan. 3. Kerusakan Sumber Daya Alam dan Ekosistem Perairan: rusak dan tercemarnya perairan oleh limbah (minyak, oli bekas dan sampah anorganik).	Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis di dalam KLHS RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2042 yaitu: “Belum Optimalnya Tata Kelola Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) yang terkait dengan Dinas Kelautan dan Perikanan 31 lungai Tujuan 14: Menjaga dan Memanfaatkan Lautan dan Sumber Daya Laut Secara Berkelanjutan	Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan Kebijakan Ekonomi Biru untuk Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan yaitu: a. Melindungi laut dan sumber dayanya: memperluas kawasan konservasi laut. c. Memastikan aktivitas perikanan yang berkelanjutan: - Penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota.	Visi, Misi dan Program Strategis Sumatera Selatan Tahun 2025-2029. Visi: Sumsel Maju Terus Untuk Semua Misi: - Misi ke -2: Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumberdaya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.	1. SDM nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pelaku usaha perikanan masih belum mendapatkan pelatihan yang memadai dalam aspek teknis, manajerial, dan kewirausahaan. 2. Produksi perikanan belum mencapai potensi maksimal akibat keterbatasan teknologi, sarana prasarana, kapasitas SDM, dan pengelolaan sumber daya yang belum efisien.

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pemanfaatan: 43.772 ton Tingkat pemanfaatan: 98,84 % Peluang: 1,16 % b. Perairan Umum Luas: 2.505.000 Ha Potensi: 125.250 ton Pemanfaatan: 51.035,26 ton Tingkat pemanfaatan : 40,75 % Peluang: 39,25 %	4. Usaha Ekonomi Perikanan: belum optimalnya pembinaan dan pendampingan kelompok perikanan. 5. Angka Konsumsi Ikan belum merata (untuk daerah dataran tinggi): kurangnya pasokan ikan.			- Pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan. c. Menjaga kelestarian wilayah laut: - Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. - Pengendalian sampah plastik di laut.	- Misi ke-3: Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim. - Misi 5: Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan. Program Strategis: - Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP). - 100.000 Sultan Muda Sumsel. - Program Kesejahteraan dan Kesehatan perempuan dan anak	3. Aktivitas perikanan, pelayaran, industri, dan pemukiman di sekitar perairan menghasilkan limbah yang tidak dikelola dengan baik, menyebabkan pencemaran dan kerusakan ekosistem 4. Banyak kelompok nelayan, pembudidaya, dan pengolah hasil perikanan baik laki-laki maupun perempuan belum mendapatkan pembinaan yang berkelanjutan, baik dalam aspek teknis, kelembagaan, maupun akses

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						pasar dan pembiayaan. 5. Keterbatasan Aksesibilitas dan Distribusi Ikan ke wilayah dataran tinggi dan minimnya infrastruktur rantai dingin (cold chain)

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu Tahun 2025 – 2029 adalah :

“ Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan ”

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan serta harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai. Maka sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan yang ingin dicapai adalah :

“Meningkatnya Nilai Tukar Pelaku Usaha Perikanan”

Dalam penentuan target tahun 2025-2030 dilakukan secara rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai data baseline, sebagaimana tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE	TARGET TAHUN					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya pengembangan potensi ekonomi sektor unggulan daerah	Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		Nilai Tukar Nelayan/NTN	117,43	117,50	117,87	118,18	118,45	118,92	119,50
			Nilai Tukar Pembudidaya Ikan/ NTPi	94,84	94,32	94,47	94,51	94,64	94,80	95,10
		Meningkatnya Nilai Tukar Pelaku Usaha Perikanan	Nilai Tukar Nelayan/NTN	117,43	117,50	117,87	118,18	118,45	118,92	119,50
			Nilai Tukar Pembudidaya Ikan/ NTPi	94,84	94,32	94,47	94,51	94,64	94,80	95,10
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	Nilai Evaluasi AKIP	80,01	80,5	81	81,5	82	82,5	83

Tabel diatas merinci arah kebijakan strategis sektor kelautan dan perikanan dalam kerangka RPJMD, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan sebagai tujuan utama. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya nilai tukar pelaku utama sektor kelautan dan perikanan, yang diukur melalui dua indikator utama: Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi). Kedua indikator ini mencerminkan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran pelaku usaha, serta menjadi tolok ukur kesejahteraan mereka.

Target tahunan untuk NTN dari 117,50 pada tahun 2025 hingga 119,50 pada tahun 2030, menandakan harapan peningkatan daya beli dan pendapatan nelayan. Sementara itu, Target NTPi juga mengalami kenaikan dari 94,32 di tahun 2025 hingga 95,10 di tahun 2029. Secara keseluruhan, target dari indikator diatas menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sektor unggulan melalui pendekatan berbasis kesejahteraan pelaku utama.

3.3. Strategi Dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dimiliki Perangkat Daerah, maka strategi pembangunan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memodernisasi alat tangkap ramah lingkungan untuk nelayan tradisional;
2. Mengembangkan klaster industri perikanan (hilirisasi) berbasis lokal;
3. Meningkatkan pengawasan kelautan perikanan terintegrasi;
4. Melaksanakan program rehabilitasi mangrove dan mengembangkan kawasan konservasi laut daerah (KKLD) dengan melibatkan masyarakat lokal;
5. Melaksanakan pelatihan kewirausahaan bagi pelaku usaha kelautan perikanan;
6. Memperluas akses kredit sektor kelautan dengan kemudahan syarat;
7. Mengoptimalkan pelayanan dan Membangun pelabuhan perikanan (PP) dan tempat pendaratan ikan (TPI) skala lokal;
8. Menerapkan Sistem Data Informasi Kelautan dan Perikanan terintegrasi;
9. Memperkuat forum koordinasi lintas sektor;
10. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur melalui pelatihan bidang kelautan perikanan modern;

3.4. Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Penahapan Renstra Perangkat Daerah adalah suatu strategi perencanaan yang disusun secara bertahap dan sistematis oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan tujuan dan sasaran pembangunan selama periode lima atau enam tahun (sesuai dengan siklus RPJMD atau RPJPN). Penahapan ini digunakan untuk mengatur fokus dan skala pelaksanaan program/kegiatan setiap tahunnya agar capaian pembangunan dapat dicapai secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Dalam penahapan Renstra, masing-masing tahun dirancang dengan prioritas tertentu yang disesuaikan dengan kondisi awal (baseline), ketersediaan anggaran, kesiapan sumber daya, serta urgensi permasalahan. Misalnya, tahun pertama biasanya difokuskan pada pemetaan, persiapan, penguatan kelembagaan, dan pengumpulan data dasar. Tahun-tahun berikutnya berfokus pada pelaksanaan program strategis seperti pembangunan fisik, peningkatan kapasitas, atau pemberdayaan masyarakat. Sedangkan tahun terakhir digunakan untuk evaluasi, replikasi keberhasilan, dan penyusunan strategi lanjutan.

Tujuan dari penahapan ini adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan Renstra berjalan secara logis, terstruktur, serta selaras dengan arah pembangunan nasional dan daerah. Dengan demikian, perangkat daerah tidak hanya menjalankan kegiatan secara rutin, tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah yang diambil berkontribusi nyata terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah. Tabel penahapan Renstra dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2 Penahapan Renstra PD

TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)	TAHAP VI (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan Kapasitas Produksi - Pelatihan budidaya/tangkap ramah lingkungan - Bantuan sarana produksi (benih, pakan, alat tangkap, alat pengolahan) - Dukungan pengelolaan usaha - Pembuatan <i>Cold Storage</i> Penetapan Pulau Maspari sebagai Kawasan Konservasi	Diversifikasi dan Nilai Tambah - Pelatihan pengolahan hasil perikanan - Pengembangan usaha perikanan terpadu (pemasaran, olahan, wisata) - Peningkatan mutu dan nilai produk	Efisiensi Biaya Produksi dan Penguatan Pasar - Digitalisasi pemasaran - Fasilitasi akses pasar dan distribusi - Subsidi sarana produksi strategis	Penguatan Kemandirian dan Keberlanjutan - Fasilitasi akses pembiayaan dan asuransi - Sertifikasi mutu hasil perikanan - Penguatan koperasi dan jejaring usaha	Evaluasi, Replikasi dan Integrasi Renstra Baru - Evaluasi dan pelaporan capaian sasaran - Duplikasi program di wilayah lain - Integrasi hasil capaian ke dalam rencana strategis selanjutnya

3.5. Penyajian Lokasi Fokus (Lokus)

Lokasi fokus (Lokus) prioritas dalam Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah berada di 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, dengan fokus utama pada pengembangan sektor perikanan, baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan. Setiap daerah di Kabupaten/Kota secara umum memiliki kebutuhan sarana dan prasarana untuk kegiatan perikanan tangkap, seperti : mesin perahu, alat tangkap (jaring/Jala), alat bantu penangkapan ikan (senter, alat penerangan, GPS, HT,dan lain-lain), cold box dan sebagainya. Sarana dan prasarana untuk kegiatan perikanan budidaya, seperti : benih ikan, pakan, mesin sedot lumpur, dan sarana produksi lainnya. Sarana prasarana pengolahan ikan, seperti : alat pengolahan (mesin penggiling, alat pengadon, vaccum sealear, chest freezer, alat pengasap ikan dan sebagainya).

3.6. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029

Arah kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan memperhatikan Tujuan, Sasaran, Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Selatan 2025-2029, maka telah dirumuskan kebijakan sebagai berikut :

- 1. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan;
- 2. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Perikanan;
- 3. Pemberdayaan Kelompok atau Pelaku Usaha Kelautan Perikanan dan Masyarakat Pesisir;
- 4. Pengembangan Infrastruktur Kelautan dan Perikanan;
- 5. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Kelautan dan Perikanan;
- 6. Adaptasi Perubahan Iklim dan Ekosistem Pesisir.

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO.	OPERASIONALISASI NSK	ARAHKEBUAKAN RRMD	ARAHKEBUAKAN RENSIRAPD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kelautan dan perikanan	Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat.	1. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan; 2. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Perikanan; 3. Pemberdayaan Kelompok atau Pelaku Usaha Kelautan Perikanan dan Masyarakat Pesisir; 4. Pengembangan Infrastruktur Kelautan dan Perikanan; 5. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Kelautan dan Perikanan; 6. Adaptasi Perubahan Iklim dan Ekosistem Pesisir.	

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan Dan Subkegiatan Penyelenggaraan Urusan Bidang Kelautan Perikanan

Penjabaran terkait dengan rencana program kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan disajikan dalam Tabel 4.1 dan Tabel 4.2, adapun program/kegiatan/sub kegiatan tersebut antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.1.4. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah
- 1.1.5. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 1.3.1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

1.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1.4.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 1.4.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 1.5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.5.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 1.5.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.5.5. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 1.5.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.6.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.7.1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

1.7.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.8.2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1.8.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.8.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

2.1. Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

2.1.1. Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat

2.1.2. Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

2.1.3. Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir

2.2. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

2.2.1. Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

3.1. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil

3.1.1. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan

3.1.2. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

3.1.3. Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

3.2. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

3.2.1. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan

3.2.2. Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

3.3. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT

- 3.3.1. Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT – 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil

3.4. Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi

- 3.4.1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
- 3.4.2. Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan

4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

4.1. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

- 4.1.1. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
- 4.1.2. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
- 4.1.3. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan

4.2. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut

- 4.2.1. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 4.2.2. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
- 4.2.3. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 4.2.4. Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

4.3. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat

- 4.3.1. Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 4.3.2. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

5.1. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 mil

- 5.1.1. Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi
- 5.1.2. Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas.

5.2. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

- 5.2.1. Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi
- 5.2.2. Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi
- 5.2.3. Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi

6. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

6.1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

- 6.1.1. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Menengah dan Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri
- 6.1.2. Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar

6.2. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

- 6.2.1. Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing
- 6.2.2. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

6.3. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

- 6.3.1. Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
- 6.3.2. Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya pengembangan potensi ekonomi sektor unggulan daerah	Meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya Ikan				Nilai Tukar Nelayan (NTN)		
Meningkatnya ketahanan pangan daerah					Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)		
		Meningkatnya Produktivitas Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan			Produksi Perikanan Budidaya (Ton)		
					Produksi Perikanan Tangkap (Ton)		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan			Nilai Evaluasi AKIP		
			Meningkatnya Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yang Terlayani		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yang Terlayani	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
				Terlaksananya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Pendukung Statistik Sektoral Daerah		
				Terlaksananya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Tersediannya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
				Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Kontiribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB		Kontiribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	
				Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut sampai	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil di luar Minyak dan Gas Bumi	Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dengan 12 Mil di luar Minyak dan Gas Bumi			
					Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Terkelola	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	
					Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	
					Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir yang menginformasikan perwujudan ruang sesuai Materi Teknis Perairan Pesisir/dalam Perda RTRWP	Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	
				Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	
					Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- pulau Kecil	
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
				Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	
					Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	
					Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	
					Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
				Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa,	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	
					Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
				Terlaksananya Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	
					Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT – 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT – 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	
				Terlaksananya Kegiatan Penetapan Lokasi 48ungai48unan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Kegiatan Penetapan Lokasi 48ungai48unan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Kegiatan Penetapan Lokasi 48ungai48unan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	
					Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
				Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	
				Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	
					Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	
					Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	
					Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati		Luasan Kawasan Konservasi	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
				Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 mil	Jumlah Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 mil	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 mil	
					Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	
					Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas	
				Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	
					Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah 50ungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah 50ungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah 51ungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah 51ungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat		Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	
				Terlaksana Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	
				Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	
					Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	
					Jumlah Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket	
		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		12PS	ProSN
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Urusan Kelautan dan Perikanan	1. Nilai Tukar Nelayan (NTN)	117,5		117,87		118,18		118,45		118,92		119,50			
	2. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	94,32		94,47		94,51		94,64		94,80		95,10			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yang Terlayani	100%	25.205,66	100%	23.999,63	100%	27.936,40	100%	28.506,47	100%	28.281,48	100%	29.796,48		
Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	643,00	4 Dokumen	208,23	4 Dokumen	656,93	4 Dokumen	657,00	4 Dokumen	657,00	4 Dokumen	657,00		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	476,00	2 Dokumen	71,23	2 Dokumen	395,00	2 Dokumen	395,00	2 Dokumen	395,00	2 Dokumen	395,00		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	27,00	1 Laporan	15,00	1 Laporan	17,00	1 Laporan	17,00	1 Laporan	17,00	1 Laporan	17,00		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	140,00	1 Laporan	40,00	1 Laporan	159,93	1 Laporan	160,00	1 Laporan	160,00	1 Laporan	160,00		
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			3 Data	70,00	3 Data	50,00	3 Data	50,00	3 Data	50,00	3 Data	50,00		
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			1 Dokumen	12,00	1 Dokumen	35,00	1 Dokumen	35,00	1 Dokumen	35,00	1 Dokumen	35,00		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	179 Orang/Bulan	20.239,91	179 Orang/Bulan	21.571,30	179 Orang/Bulan	22.170,78	179 Orang/Bulan	22.689,93	179 Orang/Bulan	23.222,05	179 Orang/Bulan	23.767,48		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	179 Orang/Bulan	17.452,26	179 Orang/Bulan	20.259,30	179 Orang/Bulan	20.765,78	179 Orang/Bulan	21.284,93	179 Orang/Bulan	21.817,05	179 Orang/Bulan	22.362,48		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	2.760,65	1 Dokumen	1.300,00	1 Dokumen	1.388,00	1 Dokumen	1.388,00	1 Dokumen	1.388,00	1 Dokumen	1.388,00		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semeseteran SKPD	Tersediannya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semeseteran SKPD	1 Laporan	27,00	1 Laporan	12,00	1 Laporan	17,00	1 Laporan	17,00	1 Laporan	17,00	1 Laporan	17,00		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	1 Kegiatan	95,00	1 Kegiatan	67,50	1 Kegiatan	100,00	1 Kegiatan	100,00	1 Kegiatan	100,00	1 Kegiatan	100,00		
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	95,00	1 Jenis	67,50	1 Jenis	100,00	1 Jenis	100,00	1 Jenis	100,00	1 Jenis	100,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket	
		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		12PS	ProSN
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	1 Kegiatan	230,00	1 Kegiatan	60,00	2 Kegiatan	440,00	2 Kegiatan	450,00	2 Kegiatan	460,00	2 Kegiatan	470,00		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan					1 Paket	190,00	1 Paket	190,00	1 Paket	190,00	1 Paket	190,00		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 Orang	230,00	5 Orang	60,00	12 Orang	250,00	14 Orang	260,00	16 Orang	270,00	18 Orang	280,00		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Kegiatan	2.004,97	6 Kegiatan	818,00	7 Kegiatan	1.851,69	7 Kegiatan	1.892,55	7 Kegiatan	2.025,43	7 Kegiatan	1.985,00		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	120,00	1 Paket	80,00	1 Paket	120,00	1 Paket	120,00	1 Paket	120,00	1 Paket	120,00		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	296,00			1 Paket	420,00	1 Paket	450,00	1 Paket	530,00	1 Paket	500,00		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	1 Paket	348,97	1 Paket	127,00	1 Paket	211,69	1 Paket	222,55	1 Paket	225,43	1 Paket	215,00		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	265,00	1 Paket	50,00	1 Paket	200,00	1 Paket	200,00	1 Paket	200,00	1 Paket	200,00		
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	220,00	1 Laporan	60,00	1 Laporan	200,00	1 Laporan	200,00	1 Laporan	200,00	1 Laporan	200,00		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	755,00	1 Laporan	501,00	1 Laporan	700,00	1 Laporan	700,00	1 Laporan	750,00	1 Laporan	750,00		
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan														
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	1.115,00	2 Laporan	854,60	2 Laporan	1.117,00	2 Laporan	1.117,00	2 Laporan	1.117,00	2 Laporan	1.117,00		
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	682,00	1 Laporan	419,60	1 Laporan	682,00	1 Laporan	682,00	1 Laporan	682,00	1 Laporan	682,00		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	433,00	1 Laporan	435,00	1 Laporan	435,00	1 Laporan	435,00	1 Laporan	435,00	1 Laporan	435,00		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	66 Unit	877,78	66 Unit	420,00	66 Unit	1.600,00	66 Unit	1.600,00	66 Unit	700,00	66 Unit	1.700,00		

BIDANG URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket	
		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		12PS	ProSN
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	517,90	32 Unit	240,00	32 Unit	450,00	32 Unit	450,00	32 Unit	450,00	32 Unit	450,00		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	9,88			4 Unit	900,00	4 Unit	900,00			4 Unit	950,00		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	100,00	2 Unit	180,00	15 Unit	100,00	15 Unit	100,00	15 Unit	100,00	15 Unit	100,00		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	250,00			1 Unit	150,00	1 Unit	150,00	1 Unit	150,00	1 Unit	200,00		
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	1,15%	351,35	1,38%	158,00	1,66%	835,00	1,99%	885,00	2,38%	920,00	2,86%	960,00		
Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil di luar Minyak dan Gas Bumi	2 kegiatan	315,00	3 Kegiatan	142,50	3 Kegiatan	710,00	3 Kegiatan	735,00	3 Kegiatan	745,00	3 Kegiatan	760,00		
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	976 Ha	35,00	976,032 Ha	10,00	976,032 Ha	260,00	976,032 Ha	260,00	976,032 Ha	270,00	976,032 Ha	270,00		
Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	10 Ha	280,00	5 Ha	120,00	10 Ha	350,00	11 Ha	375,00	11 Ha	375,00	12 Ha	390,00		
Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir yang menginformasikan perwujudan ruang sesuai Materi Teknis Perairan Pesisir/dalam Perda RTRWP			1 Dokumen	12,50	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	100,00		
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 Kegiatan	36,35	1 Kegiatan	15,50	1 Kegiatan	125,00	1 Kegiatan	150,00	1 Kegiatan	175,00	1 Kegiatan	200,00		
Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	60 Orang	36,35	20 Orang	15,50	80 Orang	125,00	100 Orang	150,00	120 Orang	175,00	140 Orang	200,00		
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	162.017 ton	2.692,42	165.337 ton	745,00	168.644 ton	6.750,00	169.017 ton	7.020,00	175.457 ton	8.320,00	178.966 ton	8.450,00		
Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Kegiatan	700,00	2 Kegiatan	220,00	3 Kegiatan	1.800,00	3 Kegiatan	2.000,00	3 Kegiatan	2.400,00	3 Kegiatan	2.450,00		

BIDANG URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket	
		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		12PS	ProSN
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil					1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	100,00		✓
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil					1 Unit	200,00	1 Unit	200,00	1 Unit	200,00	1 Unit	200,00		✓
Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	100 Unit	700,00	20 Unit	220,00	185 Unit	1.500,00	200 Unit	1.700,00	215 Unit	2.100,00	230 Unit	2.150,00	✓	✓
Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2 kegiatan	1.738,77	2 kegiatan	461,00	2 kegiatan	4.050,00	2 kegiatan	4.050,00	2 kegiatan	4.950,00	2 kegiatan	5.000,00		
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	1 Dokumen	38,77	1 Dokumen	16,00	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	100,00		✓
Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	210 Unit	1.700,00	50 Unit	445,00	350 Unit	3.950,00	370 Unit	3.950,00	390 Unit	4.850,00	415 Unit	4.900,00	✓	✓
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	1 Kegiatan	36,70	1 Kegiatan	23,00	1 Kegiatan	200,00	1 Kegiatan	200,00	1 Kegiatan	200,00	1 Kegiatan	230,00		
Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT – 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT – 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	70%	36,70	70%	23,00	90%	200,00	90%	200,00	90%	200,00	100%	230,00		
Kegiatan Penetapan Lokasi 56ungai56unan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Kegiatan Penetapan Lokasi 56ungai56unan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	1 Kegiatan	216,95	1 Kegiatan	41,00	2 kegiatan	700,00	2 kegiatan	770,00	2 kegiatan	770,00	2 kegiatan	770,00		
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia					1 Unit	400,00	1 Unit	450,00	1 Unit	450,00	1 Unit	450,00		✓
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	1 Layanan	216,95	1 Layanan	41,00	1 Layanan	300,00	1 Layanan	320,00	1 Layanan	320,00	1 Layanan	320,00		

BIDANG URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket	
		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		12PS	ProSN
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	285.750 ton	3.150,15	295.286 ton	1.305,00	305.000 ton	7.170,00	315.000 ton	8.030,00	325.000 ton	8.820,00	335.000 ton	8.955,00		
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Kegiatan	28,20	2 Kegiatan	60,00	3 Kegiatan	310,00	3 Kegiatan	320,00	3 Kegiatan	350,00	3 Kegiatan	375,00		
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan			36 Rekomendasi	50,00	38 Rekomendasi	110,00	40 Rekomendasi	120,00	42 Rekomendasi	130,00	44 Rekomendasi	140,00		
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan					5 Rekomendasi	80,00	5 Rekomendasi	80,00	8 Rekomendasi	100,00	8 Rekomendasi	100,00		
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	1 Dokumen	28,20	1 Dokumen	10,00	1 Dokumen	120,00	1 Dokumen	120,00	1 Dokumen	120,00	1 Dokumen	135,00		
Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Kegiatan	220,00	3 Kegiatan	80,00	4 Kegiatan	660,00	4 Kegiatan	740,00	4 Kegiatan	750,00	4 Kegiatan	760,00		
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1 Dokumen	150,00	1 Dokumen	150,00	1 Dokumen	150,00	1 Dokumen	150,00		✓
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit	220,00	1 Unit	55,00	1 Unit	300,00	1 Unit	350,00	1 Unit	350,00	1 Unit	350,00		✓
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia					5 Unit	100,00	6 Unit	120,00	6 Unit	120,00	6 Unit	120,00		
Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			7 Dokumen	25,00	36 Dokumen	110,00	38 Dokumen	120,00	40 Dokumen	130,00	42 Dokumen	140,00		
Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	2 kegiatan	2.901,95	2 kegiatan	1.165,00	2 kegiatan	6.200,00	2 kegiatan	6.970,00	2 kegiatan	7.720,00	2 kegiatan	7.820,00		
Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	120 Unit	2.851,95	34 Unit	1.140,00	200 Unit	5.900,00	225 Unit	6.650,00	250 Unit	7.400,00	275 Unit	7.500,00	✓	✓

BIDANG URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket	
		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		12PS	ProSN
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	50,00	1 Unit	25,00	1 Unit	300,00	1 Unit	320,00	1 Unit	320,00	1 Unit	320,00		✓
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Luas Kawasan Konservasi	976,032 Ha	569,66	976,032 Ha	135,00	976,032 Ha	1.200,00	976,032 Ha	1.300,00	976,032 Ha	1.350,00	976,032 Ha	1.430,00		
Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 mil	Jumlah Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 mil	2 Kegiatan	535,91	2 Kegiatan	105,00	2 Kegiatan	1.050,00	2 Kegiatan	1.150,00	2 Kegiatan	1.200,00	2 Kegiatan	1.280,00		
Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	112,00	4 Pelaku Usaha	25,00	30 Pelaku Usaha	250,00	40 Pelaku Usaha	300,00	40 Pelaku Usaha	300,00	50 Pelaku Usaha	330,00		
Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	38 Kelompok	423,91	2 Kelompok	80,00	38 Kelompok	800,00	38 Kelompok	850,00	38 Kelompok	900,00	38 Kelompok	950,00		
Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3 Kegiatan	33,75	3 Kegiatan	30,00	3 Kegiatan	150,00	3 Kegiatan	150,00	3 Kegiatan	150,00	3 Kegiatan	150,00		
Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	11,25	8 Pelaku Usaha	10,00	30 Pelaku Usaha	50,00	30 Pelaku Usaha	50,00	30 Pelaku Usaha	50,00	30 Pelaku Usaha	50,00		
Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah 58sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah 58sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	11,25	8 Pelaku Usaha	10,00	30 Pelaku Usaha	50,00	30 Pelaku Usaha	50,00	30 Pelaku Usaha	50,00	30 Pelaku Usaha	50,00		
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah 58sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah 58sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	11,25	8 Pelaku Usaha	10,00	30 Pelaku Usaha	50,00	30 Pelaku Usaha	50,00	30 Pelaku Usaha	50,00	30 Pelaku Usaha	50,00		

BIDANG URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket	
		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		12PS	ProSN
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	30,76 kg/kapita/ta hun	1.378,11	31,45 kg/kapita/ta hun	650,50	32,13 kg/kapita/ta hun	3.700,00	32,83 kg/kapita/ta hun	3.850,00	33,51 kg/kapita/ta hun	3.900,00	34 kg/kapita/ta hun	4.000,00		
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Kegiatan	160,00												
Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	1 Dokumen	160,00												
Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	2 kegiatan	820,28	2 kegiatan	300,00	2 kegiatan	2.850,00	2 kegiatan	2.950,00	2 kegiatan	3.000,00	2 kegiatan	3.100,00		
Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	1 Kegiatan	400,00	1 Kegiatan	160,00	1 Kegiatan	600,00	1 Kegiatan	650,00	1 Kegiatan	650,00	1 Kegiatan	700,00		✓
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1 Kegiatan	420,28	1 Kegiatan	140,00	3 Kegiatan	2.250,00	3 Kegiatan	2.300,00	3 Kegiatan	2.350,00	3 Kegiatan	2.400,00	✓	✓
Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Kegiatan	397,83	2 Kegiatan	350,50	2 Kegiatan	850,00	2 Kegiatan	900,00	2 Kegiatan	900,00	2 Kegiatan	900,00		
Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	397,83	1 Dokumen	324,00	1 Dokumen	600,00	1 Dokumen	650,00	1 Dokumen	650,00	1 Dokumen	650,00	✓	✓

BIDANG URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket	
		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		12PS	ProSN
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi			2 Unit Usaha	26,50	20 Unit Usaha	250,00	20 Unit Usaha	250,00	20 Unit Usaha	250,00	20 Unit Usaha	250,00		
JUMLAH			33.347,34		26.993,13		47.591,40		49.591,47		51.591,48		53.591,48		

4.3 Tabel Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO (1)	PROGRAM PRIORITAS (2)	OUTCOME (3)	KEGIATAN/SUBKEGIATAN (4)	KET (5)
1	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)	Meningkatnya produksi pangan perikanan	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	PS 3
			Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
			Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
			Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
			Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	
			Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
			Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	
2	100.000 Sultan Muda Sumsel	Meningkatnya promosi usaha kecil dan menengah wirausaha muda bidang perikanan	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	PS 7
			Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
3	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Meningkatnya dukungan program makan bergizi gratis	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	PS 11
			Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	

Tabel berikut menyajikan daftar subkegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mendukung program prioritas Provinsi Sumatera Selatan. Setiap subkegiatan disusun untuk mendukung pencapaian outcome dari program strategis yang ditetapkan Pemerintah Provinsi, dengan menekankan aspek peningkatan produksi, pemberdayaan pelaku usaha perikanan, serta kontribusi terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu program prioritas utama yaitu Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) menekankan pada peningkatan produksi pangan perikanan. Untuk mendukungnya, dirancang berbagai kegiatan seperti penyediaan sarana usaha perikanan tangkap di wilayah perairan laut dan perairan darat, serta penyediaan sarana pembudidayaan ikan di air payau dan tawar. Selain itu, dilakukan juga pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan skala menengah dan besar guna meningkatkan standar dan daya saing produk.

Program prioritas kedua, yaitu 100.000 Sultan Muda Sumsel, bertujuan untuk meningkatkan promosi wirausaha muda di sektor perikanan. Kegiatan yang mendukung program ini meliputi penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan, serta pemetaan dan pemantauan kebutuhan bahan baku lintas daerah. Hal ini menunjukkan adanya komitmen untuk mendukung tumbuhnya UMKM perikanan berbasis inovasi dan kewirausahaan pemuda, khususnya dalam rantai nilai pengolahan dan distribusi hasil perikanan.

Sementara itu, program ketiga yang berkaitan dengan Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak diarahkan pada mendukung penyediaan makanan bergizi gratis. Dalam konteks ini, Dinas Kelautan dan Perikanan berperan melalui penyediaan bahan baku industri pengolahan ikan serta pemantauan kebutuhan distribusinya. Ikan sebagai sumber protein bergizi menjadi komponen penting untuk mendukung program pangan sehat bagi perempuan dan anak. Keterlibatan dinas dalam program lintas sektor ini menunjukkan sinergi lintas OPD untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh dan inklusif.

4.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator kinerja adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja akan menjelaskan bagaimana sasaran telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Tingkat pencapaian indikator kinerja akan memberikan informasi tentang kinerja organisasi. Apabila didukung dengan sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai dan akurat, maka hal tersebut akan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh. Indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat penting pada saat merencanakan program dan kegiatan. Dengan menggunakan indikator kinerja, maka proses perencanaan akan mengatur dan menentukan langkah-langkah yang lebih tepat untuk pelaksanaan pembangunan suatu sektor. Penetapan indikator kinerja akan menghasilkan proses perencanaan yang berkualitas dan lebih obyektif serta terukur. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan selama periode Renstra selanjutnya dapat dilihat pada berikut :

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai Tukar Nelayan/NTN	Nilai	117,43	117,50	117,87	118,18	118,45	118,92	119,50	
2	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI)	Nilai	94,84	94,32	94,47	94,51	94,64	94,80	95,10	

Pada tahun 2024, NTPI ditetapkan pada baseline 94,84. Namun, target tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 94,32. Penurunan ini bukan sekadar target angka statistik saja, melainkan refleksi atas proyeksi kondisi ekonomi dan pasar yang diperkirakan akan menekan daya beli pembudidaya ikan. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah kenaikan biaya input produksi (pakan, benih, energi, dan obat-obatan) yang diproyeksikan lebih cepat dibandingkan kenaikan harga jual ikan. Penurunan target NTPI tahun 2025 ini perlu dipahami sebagai skenario realistis yang mencerminkan tantangan struktural sektor budidaya. Meski demikian, arah kebijakan tetap diarahkan pada tren positif jangka menengah dan panjang, dengan target NTPI meningkat secara bertahap hingga mencapai 95,10 pada tahun 2030.

4.3. Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Indikator Kinerja Kunci penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Bidang Kelautan dan Perikanan ditampilkan pada tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	158.918	162.017	165.337	168.644	172.017	175.457	178.966	
2	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	292.217	293.752	295.286	305.000	315.000	325.000	335.000	
3	Produksi Olahan Hasil Kelautan dan Perikanan	Ton	201.510	220.335	221.553	228.200	235.046	242.097	249.360	
4	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Thn	46,16	30,76	31,45	32,13	32,83	33,51	34	
5	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	Persen (%)	-	1,15	1,38	1,66	1,99	2,38	2,86	
6	Implementasi RZWP3K	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	
7	Kepatuhan terhadap Pemanfaatan SDKP	Orang /Pelaku Usaha	25	25	30	35	40	45	50	
8	Produksi Benur	Ekor	-	-	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000	
9	Sertifikat Hasil Uji Sampel	Sertifikat	77	97	100	103	106	109	112	

Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada tabel diatas berfungsi sebagai instrumen pengendali dan pemantau pembangunan sektor kelautan dan perikanan, dengan menyediakan ukuran kuantitatif atas capaian produksi perikanan, angka konsumsi ikan, kepatuhan pelaku usaha, dan sertifikasi hasil uji sampel. Data ini menjadi dasar untuk menilai efektivitas kebijakan, mengidentifikasi tren capaian, serta memastikan keterkaitan antara target pembangunan dengan kesejahteraan masyarakat dan kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian nasional. Dengan adanya IKK, pemerintah terkait dapat melakukan evaluasi berbasis target dan capaian, menyusun strategi intervensi yang lebih tepat sasaran, serta menjaga konsistensi arah kebijakan menuju peningkatan produksi perikanan berkelanjutan, konsumsi ikan, kepatuhan pelaku usaha, dan penguatan daya saing produk perikanan di pasar domestik maupun global.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025- 2029 merupakan dokumen perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang disusun berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029. Untuk dapat merealisasikan program/kegiatan/subkegiatan yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai sehingga memerlukan komitmen, semangat, tekad, dan kedisiplinan dalam memprioritaskan program/ kegiatan/ subkegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia dan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Mengacu pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan daerah, terdapat 5 (lima) pengarusutamaan pembangunan, meliputi :

1) Gender dan Inklusi Sosial

Pembangunan yang berkeadilan dimulai dari pengakuan terhadap keberagaman. Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial memastikan bahwa setiap individu—tanpa memandang jenis kelamin, usia, disabilitas, atau latar belakang sosial—memiliki akses yang setara terhadap sumber daya, kesempatan, dan pengambilan keputusan. Ini bukan sekadar keadilan sosial, tetapi juga strategi untuk memperkuat daya saing bangsa melalui partisipasi penuh seluruh elemen masyarakat.

2) Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan tidak boleh mengorbankan masa depan. Dengan mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, pembangunan berkelanjutan menjadi kompas dalam merancang kebijakan dan program yang berdampak jangka panjang. Setiap langkah pembangunan harus selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan pelestarian.

3) Transformasi Digital,

Di era revolusi industri 4.0, transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Digitalisasi mendorong efisiensi, transparansi, dan inovasi dalam pelayanan publik serta membuka peluang baru dalam ekonomi digital.

Pengarusutamaan transformasi digital berarti membangun ekosistem teknologi yang inklusif, aman, dan adaptif terhadap perubahan.

4) **Pembangunan Rendah Karbon**

Menghadapi krisis iklim global, pembangunan rendah karbon menjadi langkah strategis untuk menurunkan emisi dan memperkuat ketahanan lingkungan. Melalui transisi energi bersih, efisiensi sumber daya, dan gaya hidup hijau, Indonesia dapat berkontribusi aktif dalam menjaga bumi sekaligus membuka peluang ekonomi baru yang berkelanjutan.

5) **Pembangunan Berketahanan Iklim**

Perubahan iklim membawa risiko nyata bagi kehidupan dan pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan harus dirancang untuk adaptif dan tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim. Pengarusutamaan ketahanan iklim berarti memperkuat sistem peringatan dini, tata ruang berbasis risiko, dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian iklim.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dalam menentukan program/ kegiatan/ sub kegiatan pada Renstra mengikuti ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, dengan memperhatikan hal-hal seperti :

- a. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMD Tahun 2025 -2029;
- b. Evaluasi hasil capaian kinerja, tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan periode sebelumnya melalui evaluasi capaian Renja sampai dengan dengan Tahun 2024;

- c. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan Tahun 2024 dalam pencapaian hasil (outcome);
- d. Isu - isu strategis Kelautan dan Perikanan;
- e. Kebijakan nasional;
- f. Regulasi yang berlaku.

Saran dan/atau masukan dari para pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan selama periode Tahun 2025 – 2029.

Akhirnya, semoga Renstra ini dapat menjadi panduan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan di Sumatera Selatan yang lebih dan menghasilkan manfaat yang besar bagi masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya dan pelaku usaha kelautan dan perikanan pada khususnya.